

ANALISIS PRODUK INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT

Oleh

Ely Sukmana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sukmanaely@yahoo.co.id

ABSTRACT

PRODUCT ANALYSIS OF PUBLIC POLICY INNOVATION IN BUILDING COMMUNITY PARTICIPATION

The purpose of this study is to analyze the product of innovation in public policy and the application of product innovation to public policy from various regions. Public policy innovation, as an actual discovery will provide support in responding to and uncovering public policy problems in society. The method used is an approach to the technique of surveying academic literature in the field of public policy in order to obtain concepts relevant to the study of public policy innovation products. Meanwhile, in secondary data collection through searches from various sources, both government and social media reports, print and electronic mass media as data, which will be processed and described in narrative form according to data needs. Then the data analysis is carried out based on the theories and concepts of public policy which is then carried out in data processing. The results achieved in this study are efforts to produce new dimension policy innovation products and are useful for the community that can build open public participation. product innovation that is applied since the beginning of public policy planning, implementation and evaluation of public policies.

Keywords: public policy, innovation.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis produk inovasi dalam kebijakan publik dan penerapan produk inovasi kebijakan publik dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik, sebagai kaidah yang sesungguhnya akan memberikan penguatan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan kebijakan publik di masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep yang relevan dengan kajian produk inovasi kebijakan publik. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber baik dokumen pemerintah maupun pemberitaan sosial media, media masa cetak dan elektronik sebagai data sekunder, yang akan diolah dan digambarkan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian analisis data dilakukan berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya menghasilkan produk inovasi kebijakan publik dimensi baru dan bermanfaat bagi masyarakat yang dapat membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. produk Inovasi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

Kata kunci: inovasi, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Paradigma kebijakan publik yang responsif dan memberikan ruang bagi perkembangan masyarakat secara mandiri dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. sehingga dibutuhkan interaksi, dan aktivitas antara masyarakat dan pemerintah, yang diharapkan mampu menjawab dinamika, tuntutan dan kepentingan publik. Menurut Riant Nugroho (2014: 43), mengatakan bahwa “Kebijakan publik saat ini adalah produk inovasi yang Memperjuangkan kepentingan publik sebagai filosofi yang merupakan pelibatan publik atau masyarakat sejak awal hingga akhir”. Publik sebagai aktor utama kebijakan adalah sub-*stakeholder* yang secara persis mengetahui apa dan bagaimana kebutuhan dan kepentingannya.

Hal tersebut mensyaratkan pergeseran peran pemerintah bukan lagi sebagai provider akan tetapi sebagai fasilitator dan regulator suatu kebijakan. Peran pemerintah tersebut akan berjalan efektif apabila *output* kebijakan publik mampu beradaptasi dan berinovasi terhadap berbagai perubahan guna mendorong sinergitas antara berbagai kepentingan. Dengan Kata lain produk inovasi pada saat ini sudah merambat keberbagai aspek kehidupan yang merupakan salah satu faktor peran penting dalam menghadapi dan mengatasi semua masalah baik masalah individu, masyarakat, organisasi, dan negara. Dalam konteks negara dan masyarakat, negara yang berperan sebagai aktor fasilitator dan regulator kebijakan publik sedangkan inovasi sebagai *keyword* strategis di mana *output* dan *outcome* dalam kebijakan tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika perkembangan secara global dimasyarakat. Pada saat ini, inovasi dapat

memberikan penguatan pada sektor-sektor kebijakan publik yang lebih luas. Perubahan strategis kebijakan publik sebagai bentuk nyata dari inovasi hendaknya dimaknai sebagai salah satu referensi agar kebijakan publik mempunyai nilai yang baru dan manfaat bagi masyarakat luas.

Kebijakan publik yang berkualitas memberikan Harapan besar terhadap kehidupan bagi masyarakat sehingga segala kebutuhan yang diperlukan oleh publik dapat terealisasi dengan cepat yang merupakan salah satu timbulnya faktor pendorong lahirnya produk inovasi dari kebijakan publik yang berdimensi dan hanya tidak terbatas pada persoalan isu-isu dan agenda kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik tidak berada dalam area eksklusif dan melakukan pembatasan terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis publik, akan tetapi kebijakan publik dapat bergerak secara simultan dan berada dalam garis kontinum beriringan dengan publik. Deddy Mulyadi (2015: 1) mengatakan bahwa “kebijakan publik berfungsi sebagai otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat”. Dengan demikian dalam konteks memahami kebijakan publik mampu memberikan impek dan binefit, sehingga diperlukan produk inovasi kebijakan publik sebagai bentuk dorongan yang lebih luas berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan yang bersifat baru dan bermanfaat baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan. Sehingga dapat menumbuh kembangkan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi.

Perhatian terhadap semakin pentingnya inovasi kebijakan dikemukakan oleh Menteri PAN-RB. Bupati dan Sekretaris Daerah beserta jajarannya yang mengedepankan produk inovasi sebagai hasil dari kebijakan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan

dan perekonomian masyarakat serta kerapihan administrasi, inovasi kebijakan dan program-program yang direncanakan oleh pemerintah.(sumedang.go.id). Dalam konteks ini kapasitas inovator menjadi semakin penting dalam melakukan sebuah inovasi karena akan memberikan banyak manfaat.

Menurut Tri Widodo Wahyu Utomo (2016: 8), bahwa Inovasi bertujuan untuk merevitalisasi administrasi publik, membuat lebih pro aktif, efisien, akuntabel dan lebih berorientasi pada pelayanan Publik". Oleh sebab itu kemampuan pejabat publik dalam melakukan inovasi akan menjadi peran yang menentukan dan diharuskan memiliki prasyarat keterampilan dan pengetahuan memadai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputy Inovasi Administrasi Negara (2014: 16), bahwa Untuk menginisiasi, menjalankan, dan mengelola inovasi administrasi negara, maka para inovator harus menyadari bahwa pemahaman dan penguasaan yang mumpuni akan ragam keterampilan dan pengetahuan menjadi prasyarat". Maka dengan prasyarat tersebut inovasi kebijakan akan memberikan dampak yang bersifat strategis.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, maka peran pejabat publik di daerah dalam melakukan inovasi kebijakan publik akan semakin meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi kualitas kebijakan atau peraturan yang akan disusun dan telah dihasilkan. Selanjutnya Agus Dwijanto (2007: 10), mengemukakan bahwa "Kualitas peraturan daerah menjadi indikator penting kinerja tata pemerintahan di daerah". Akan tetapi faktanya, hampir semua pembuat kebijakan masih dominan mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan parsial serta belum mengedepankan budaya inovasi sehingga mengakibatkan terjadinya stagnasi kebijakan publik dan kinerja tata pemerintahan belum

berjalan secara optimal.

Persoalan rendahnya kemampuan berinovasi (*ability to innovate*) dan kemauan berinovasi (*willingnes to inovate*) menjadi salah satu tantangan bagi kalangan pejabat publik di instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat di sisi lain kebijakan publik sebagai instrumen yang berfungsi menyatukan pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pembuat kebijakan yang berbeda. Contoh dari kegagalan kebijakan pelayanan publik di Indonesia dalam wujud adanya diskonektivitas dari *output* kegiatan Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian, sebagai misal, beberapa waduk yang sudah dibangun oleh pemerintah tidak dapat berfungsi karena tidak ada saluran irigasi, pelabuhan tidak dapat beroperasi secara wajar karena tidak ada jalan yang menghubungkannya dengan kawasan industri. Untuk menghindari terminasi kebijakan tersebut, maka perlu adanya reorientasi kebijakan yang lebih terfokus baik dalam hal proses, metode maupun produk setiap kebijakan publik yang dihasilkan.

Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Persoalan-persoalan seperti disparitas pembangunan karena kurang tepatnya analisis kebijakan, perilaku koruptif para pejabat publik, ketahanan pangan, persoalan kemiskinan dan pengangguran dan pendidikan yang rendah merupakan beberapa contoh kegagalan kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan tersebut. Inovasi menjadi salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik pada masa kini dan masa yang akan datang. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan

kebijakan publik yang berbasis inovatif dari berbagai daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian

inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Inovasi Kebijakan Publik

Prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Gagasan dan ide dapat terealisasikan apabila organisasi sektor publik sebagai lokus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Mekanisme sistem organisasi sektor publik yang melibatkan lingkungan organisasi sebagai input dan proses organisasi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap perumusan kebijakan publik. Persoalannya kemudian masih banyak kebijakan publik yang sudah tidak up to date dan dianggap menghambat investasi pembangunan. Fakta menunjukkan bahwa banyak peraturan di daerah yang dicabut dikarenakan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa pemerintah secepatnya akan mencabut 3.266 perda yang dinilai menghambat masuknya investasi. dan menjelaskan juga, kategori perda bermasalah adalah menghambat investasi, perizinan, dan retribusi yang tidak perlu. Misalnya, orang yang ingin buka usaha harus diminta izin prinsip, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB) (www.jawapos.com, 13 Juni 2016).

Terhambatnya kebijakan publik melakukan perubahan disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya seperti rendahnya kapasitas pejabat publik, budaya birokrasi yang antipati terhadap perubahan dan struktur birokrasi yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Dalam kasus tertentu, banyak terjadi orientasi kebijakan publik yang berbeda antara pemerintah dan publik terutama dalam proses formulasi kebijakan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan pada tataran implementasi. Pemerintah berorientasi kepada bagaimana membelanjakan anggaran supaya terserap dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kerap kali lalai terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Kondisi tersebut memaksa publik untuk tetap patuh terhadap kebijakan dari pemerintah yang tidak memberikan dampak dan manfaat kepentingan publik.

Salah satu persoalan yang masih menyebabkan terjadinya stagnasi produk inovasi kebijakan publik adalah masih dominannya peran pemimpin atau kepala daerah, ketergantungan bawahan terhadap pemimpin atau atasan membuat seluruh sistem tidak berjalan seperti yang diharapkan, bawahan cenderung pasif dan kurang melakukan inisiatif dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan.

Menurut Morris, dalam Irwan Noor (2016: 132), bahwa “Kajian akademis tentang inovasi mensyaratkan adanya peran pemimpin sebagai administrator *There is no innovation without leadership*”. Padahal integrasi budaya inovasi dalam kebijakan

publik harus berjalan dalam sebuah sistem yang terstruktur dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini diperlukan karena masih terdapatnya disparitas antara ekspektasi masyarakat dengan kebijakan publik dan menghindari terjadinya stagnasi kebijakan publik, akan tetapi di sisi lain Tri Widodo (2016: 10), mengatakan bahwa “kesadaran inovasi di birokrasi sifatnya masih sporadis, stagnan dan cenderung tidak jelas”. Persoalan bahwa inovasi tergantung sepenuhnya kepada leader menjadi tantangan bagi birokrasi untuk menciptakan inovasi kebijakan publik melalui mekanisme sistem birokrasi. Pendapat bahwa inovasi kebijakan publik masih sangat terbatas adalah fakta yang terjadi pada saat ini di birokrasi. Inovasi kebijakan dan kreativitas yang digagas oleh pemimpin adalah penting akan tetapi sebuah sistem pelayanan publik yang baik tidak bergantung pada siapa yang memimpin. Agus Heruanto Hadna (2016: 10) mengatakan bahwa “Saat masyarakat mengadu atau melapor, secara sistemik pula bisa segera direspon oleh pemerintah”. Oleh sebab itu sebuah inovasi kebijakan tidak hanya tergantung kepada seorang leader atau pemimpin akan tetapi pada mekanisme sistem yang bekerja berdasarkan nilai-nilai organisasi publik.

Produk Inovasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Konseptual

Menurut Rogers, dalam Lydia Wijayanti (2012: 129), mengemukakan bahwa “Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat”. Aspek sesuatu yang baru tersebut dapat terbentuk melalui sebuah proses modifikasi. Dan kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (*a projected*

program of goals, values, and practices-1) yang dikemukakan oleh Harlod Laswell, Abraham Kaplan dalam Riant Nugroho (2014: 125). Sementara itu, menurut Albury, dalam *Handbook Inovasi Administrasi Negara* (2014: 18) bahwa “secara konseptual, inovasi kebijakan publik terbagi menjadi (a) *Policy innovation: new policy direction and initiatives*, yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru. (b) *Innovation in the policy making process*. Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait. (c) *Policy to foster innovation and its diffusion*, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor”

Terkait erat dengan kebijakan publik secara konseptual, maka peneliti mengemukakan definisi inovasi Administrasi Negara sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak (*Handbook Administrasi Negara-Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputy Administrasi Negara*, 2014: 17). Apabila dikaitkan dengan paradigma administrasi negara, yaitu paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Manajement* (NPM), dan *New Public Services* (NPS), maka paradigma *New Public Services* adalah yang paling tepat menerapkan prinsip-prinsip inovasi. Melalui NPS, publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis maupun sebagai

pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi (handbook Adne,2014: 14). Selanjutnya disebutkan bahwa paradigma NPS juga menaruh perhatian yang besar terhadap inovasi dan bersifat integral serta komprehensif karena NPS merupakan pendekatan yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen organisasi. Hal ini berbeda dengan paradigma lainnya yang cenderung memandang inovasi secara terbatas dan parsial.

Perbedaan paradgima administrasi negara dalam memandang inovasi penulis deskripsikan seperti tampak pada Tabel 1 di bawah.

Dalam Direktori Administrasi Negara, (2014), Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI menjelaskan bahwa “Inovasi kebijakan publik konseptual didefinisikan sebagai perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau masalah. Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma,

ide, gagasan, pemikiran dan terobosan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan”.

Sedangkan Deddy Mulyadi (2015: 10) memandang bahwa “Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi diskursus dan praktik dalam birokrasi pemerintahan. Dalam konteks paradigma atau cara pandang tersebut, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama”. Salah satu daya saing inovasi dapat dilahirkan melalui pemikiran dan terobosan baru melalui strategi kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2014: 130) bahwa “Kebijakan publik adalah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan.”

Tabel 1 Perbedaan paradgima administrasi negara dalam memandang inovasi

Deskripsi	OPA	NPA	NPM	NPS
Arti penting Inovasi	Kurang penting	Penting	Penting	Sangat penting
Ranah inovasi	Integra organisasi	Praktik-praktik administrasi publik yang lebih adil dan mampu menyelesaikan masalah publi	Hubungan organisasi publik-pelanggan	Holistik dan integral
Tujuan inovasi	Menjalankan sistem dan aturan secara efektif	Menjalankan Sistem administrasi Yang sadar Akan nilai dan norma	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja	Memenuhi kepentingan publik

Sumber: Handbook Administrasi Negara -Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Administrasi Negara, 2014

Inovasi Bagian Penting dari Kebijakan Publik

Menurut Mark Considine, Jenny M. Lewis & Damon Alexander (2009: 3), yaitu: *"These questions about the nature of innovation and the dynamics that drive it are not new. Innovation has long been identified in the foundation texts of the social sciences as a major source of social development"*. Inovasi kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan privat maupun kelompok, kebijakan publik akan bermanfaat apabila dalam penerapannya berdasarkan kriteria-kriteria dan nilai-nilai normatif standar kebijakan. Dalam penelitiannya, Mark Considine, Jenny M. Lewis, & Damon Alexander mengemukakan lima posisi normatif dalam inovasi.

Tabel 2 *The Five Normative Postions on Innovation*

1	<i>Institutional</i>	<i>Innovation relies on organizational factors</i>
2	<i>Structural</i>	<i>Innovation is about large external change</i>
3	<i>Sceptical</i>	<i>Uncertain if government has a role in innovation</i>
4		<i>Innovation is about small, planned improvements</i>
5		<i>Innovation means adapting things from elsewhere</i>

Sumber: Mark Considine, Jenny M. Lewis, & Damon Alexander, 2009.

Beberapa Kriteria dalam Handbook Administrasi Negara (2014: 26) dalam menentukan inovasi konseptual, yaitu sebagai berikut.

1. Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan;
2. Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya

dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi kebijakan konseptual dapat dikatakan berhasil;

3. Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan paradigma.

Dalam perspektif konseptual, inovasi kebijakan akan terkait dengan perubahan cara pandang terhadap permasalahan sedang terjadi. Kemampuan melihat permasalahan dengan sudut pandang yang mutli paradigma akan melahirkan pemikiran yang lebih konseptual. Kemudian membandingkan kebijakan lama dan kebijakan baru dapat dilihat sebagai ukuran keberhasilan sebuah inovasi kebijakan, apabila kinerja kebijakan baru yang telah dilakukan inovasi berhasil, maka dapat disimpulkan kebijakan tersebut berhasil. Selanjutnya inovasi kebijakan dapat dianalisis dengan melihat isu yang sedang terjadi melalui perspektif positif. Perubahan perspektif positif dengan pembaruan paradigma tersebut dapat terjadi apabila semua stakeholder yang terlibat dalam inovasi kebijakan mempunyai paradigma yang mengutamakan sinergitas.

Produk Inovasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Empiris

Terdapat beberapa jenis produk inovasi kebijakan publik, yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem dan prosedur. Kemudian jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara dan teknik baru. Dan jenis inovasi produk yang terdiri dari fisik (barang) maupun nonfisik atau imaterial (jasa). Pada tataran empiris, manfaat inovasi dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan

menjadi terpadu, perluasan pilihan publik (*public choice*) terhadap barang-barang publik (*public goods*), penguatan *public engagement* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, serta model-model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan *stakeholder*-nya

Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada kualitas proses kerja baik eksternal maupun internal agar lebih sederhana dan efisien. Berikut adalah contoh-contoh dari penerapan produk inovasi kebijakan yang bersumber dari Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014.

(1) Produk Inovasi: Perubahan Pelayanan Penertiban Paspor.

Jenis Inovasi: Proses.

Unit Pelaksana: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Jakarta Selatan.

Penggagas: Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT)/Sistem *One Stop Service* (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang yang sebelumnya harus mengantre empat kali menjadi mengantre 1 kali dalam mendapatkan pelayanan paspor. Terobosan ini dinilai sangat sesuai dengan moto Dirjen Imigrasi yakni “menuju pelayanan yang lebih aman, mudah, transparan, serta memberikan kepastian dengan pemanfaatan teknologi informasi” Harapannya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ketika mengajukan permohonan penerbitan paspor di setiap kantor imigrasi. Terobosan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh Dirjen Imigrasi

Fakta empiris inovasi metode lebih ditujukan dalam menerapkan sebuah cara, strategi dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

(2) Produk Inovasi : Pelayanan Pertanian Jemput Bola

Jenis Inovasi: Metode

Unit Pelaksana: Kantor Pertanian, Penggagas: Badan Pertanahan Nasional RI

Layanan Jemput Bola “LARASITA” merupakan layanan pertanian bergerak (*mobile land service*) yang bersifat pro aktif dengan “hadirnya” petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat. Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanian. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanian padaprosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanian, di mana sering kali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanian karena formalitasnya. Dengan kemampuannya LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanian, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumber daya untuk penghidupannya.

(3) Produk Inovasi : Metode Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

Jenis Inovasi: Metode

Unit Pelaksana: Kabupaten Buton Utara
Kampo Waraka merupakan upaya yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

bidang kesehatan sekaligus mendukung pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berbasis web mutakhir. Upaya ini diterapkan akibat adanya banyak temuan data tentang gizi buruk, kekurangan gizi, lumpuh layu, kaki gajah dan kematian ibu bersalin. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan yang terdapat di daerah tersebut karena pembangunan fasilitas kesehatan tersebut belum selesai. Pelaksanaan Kampanye Waraka dilaksanakan melalui penerapan upaya antara lain 1) mengembangkan kemitraan bidan, dukun dan kader posyandu 2) mengembangkan insentif bagi ibu hamil resiko tinggi dari keluarga miskin 3) mendorong akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

(4) Produk Inovasi : Distribusi Guru PNS Proporsional

Jenis Inovasi: Metode

Unit Pelaksana: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Distribusi Guru PNS Proporsional DGP merupakan pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga untuk menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Tujuan DGP antara lain: 1) tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan yang berkualitas, akuntabel dan transparan, 2) peningkatan SPM Pendidikan dan perbaikan layanan melalui PBM berkualitas secara kontinu dan berkelanjutan, dan 3) mendorong partisipasi publik melalui FMS dan Warung Demokrasi dari tahap perencanaan hingga monev. Program

DGP ini dilatarbelakangi ada kesenjangan besar dalam distribusi kelas dan guru mata pelajaran. Data menunjukkan bahwa hanya 47% dari 259 sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki cukup guru kelas PNS. Melihat kenyataan seperti itu dibutuhkan suatu upaya untuk membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dan akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, yaitu dengan Distribusi Guru PNS Proporsional (DGP). Strategi pelaksanaan DGP, antara lain: penguatan organisasi masyarakat sipil, pembentukan dan penguatan Forum Multi Stakeholder (FMS), Pembentukan tim teknis di lingkungan Pemda, advokasi kebijakan oleh tim teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh FMS.

Produk Inovasi ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut.

(5) Produk Inovasi: Pelayanan Pembuatan SIM

Jenis Inovasi: Produk,

Unit Pelaksana : Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) SIM Polda Metro Jaya.

Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM pada masyarakat yang dilakukan oleh Satpas SIM untuk membuat pelayanan semakin baik dan mendekatkan pelayanan SIM pada Masyarakat. Terobosan ini dilatar belakangi oleh waktu pembuatan SIM yang relatif lama, pemusatan pelayanan, juga terjadinya praktek percaloan pembuatan SIM. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses lokasi dan menurunkan waktu proses pembuatan SIM, serta menghilangkan praktik percaloan

pembuatan SIM. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuka pelayanan pembuatan SIM di lima wilayah DKI Jakarta, menyediakan fasilitas SIM keliling di lima wilayah DKI Jakarta, Gerai SIM, standarisasi waktu pelayanan pembuatan SIM, SIM komunitas, banking system, online system, komputerisasi ujian SIM, penggunaan *access card*, program bimbingan, dan aplikasi komputer database. Selain strategi tersebut Satpas SIM membuat lingkungan kantor senyaman mungkin seperti menyediakan ruang pengaduan, ruang bermain, ruang menyusui, ruang perpustakaan, fasilitas ibadah, tempat parkir kendaraan yang luas Masyarakat merupakan terobosan pelayanan.

(6) Produk Inovasi: Modernisasi KIA dan Sistem Relasi Catatan Kelahiran

Jenis Inovasi: produk,

Unit Pelaksana: Disdukcapil bagian bidang data dan statistik Surakarta

Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publikterbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No.23 Tahun belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan Tujuan KIA adalah: 1) memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak 2) untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, 3) untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di Kota Surakarta di

bidang kesehatan pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak.

(7) Produk Inovasi: Sistem Pengolahan Sampah Plastik

Jenis Inovasi: produk,

Unit Pelaksana: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung.

Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (Gelatik) merupakan program unggulan mengurangi sampah plastik, juga mengubahnya menjadi energi terbarukan. Adapun tujuan, yaitu pembentukan Program Gelatik tersebut bertujuan untuk menanggulangi sampah plastik dan membuatnya menghasilkan manfaat-manfaat ekonomis melalui pelibatan partisipasi masyarakat. Program Gelatik ini dilaterbelakangi oleh pengelolaan sampah plastik selama ini belum dilakukan secara optimal dan belum dapat menghasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi Hingga saat ini program Gelatiktelah menghasilkan sebuah reaktor pirolisis yang mampu mengolah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif terbarukan, di mana manfaat gelatik power projek tahap I telah menghasilkan BBM, selain itu sampah plastik juga didaur ulang menjadi tas. “Guna mendukung program ini, pada 2014 Pemkab Badung mengalokasikan dana sebesar Rp5,4M untuk pembangunan 16 TPST. Agar program Gelatik mampu mengoptimalkan penanganan

sampah plastik, maka Pemkab Badung melakukan strategi dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari sekolah-sekolah, pasar tradisional, kelompok masyarakat maupun PKK. Beberapa komponen pendukung gelatik terdiri dari 118 sekolah, 132 unit pasar, kelompok masyarakat 24 unit, 6 kelompok PKK serta dukungan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Inovasi kebijakan berbasis teknologi ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah.

(8) Produk Inovasi: Pengelolaan Layanan Online Data Kepegawaian Berbasis WEB

Jenis Inovasi: Teknologi,

Unit Pelaksana: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP

SISPEDAP (Sistem Pengelolaan Data Pegawai) merupakan sebuah sistem pengelolaan data pegawai berbasis web (*online*) sehingga dapat terhubung langsung dengan pegawai dan unit kerja di seluruh Indonesia di mana pun dan kapan pun sepanjang terhubung dengan internet. Permasalahan dalam pengelolaan data pegawai dengan jumlah pegawai yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia memunculkan dorongan untuk menciptakan sistem pengelolaan kepegawaian. Sistem ini tidak serta merta dapat diterima langsung oleh seluruh instansi pemerintah, mengingat hampir seluruh instansi pemerintah menciptakan sistem kepegawaiannya sendiri. Pegawai dan unit kerja dapat mengakses dan memutakhirkan data pegawai secara langsung (*real time*) dan setiap saat

Inovasi Kebijakan berbasis struktur organisasi ditujukan untuk

pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama dan tidak sesuai dengan perkembangan organisasi.

(9) Produk Inovasi: Badan Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Inovasi: Struktur Organisasi,

Unit Pelaksana: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari.

BLUD kredit mikro Kota Kendari merupakan unit kerja dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kendari yang mengelola program bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh dana bagi penguatan modal usahanya. Pada periode 2007–2012 diindikasikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah mendesak untuk ditangani. Salah satu penyumbang angka kemiskinan terbesar adalah keadaan pedagang informal di Kendari yang sangat menyedihkan. Melihat kondisi tersebut, Walikota Kendari meluncurkan bantuan permodalan dalam bentuk kredit mikro kepada para pedagang keliling dan usaha kecil. Pemerintah Kota Kendari melihat perlunya upaya strategis melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya memiliki usaha jualan, di antaranya melalui Program Bantuan Kredit Mikro yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD Mikro Kota Kendari bertujuan untuk memberikan layanan peminjaman modal usaha. BLUD diarahkan untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan memotong mata rantai rentenir serta menyediakan modal usaha sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat. Secara makro konsep BLUD mengadopsi Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus. Teknis Pengelolaan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, BLUD diberikan keleluasaan untuk mengelola seluruh pendapatannya pada Pasal 62 dan dibuatkan rekening khusus. BLUD Harum Kendari sendiri dalam pengelolaan keuangan, termasuk bagi hasil dan pendapatan lainnya memiliki rekening di Bank Pembangunan Daerah Kota Kendari atas nama Kantor Badan Layanan Umum Daerah.

(10) Produk Inovasi: Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Inovasi: *Mall* Pelayanan Publik

Unit Pelaksana: Pemerintah Kabupaten Sumedang - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang

Memberikan beberapa produk inovasi dalam rangka pelayanan publik yang berbasis elektronik, layanan secara efektif yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sumedang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk membentuk Mall Pelayanan Publik tercepat seindonesia. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Mall Pelayanan Publik, yaitu Pelayanan Adminduk, BPJS, SIM, dan beberapa kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara elektronik yang merupakan pelayanan terpadu system satu pintu.

“Layanan-layanan yang teknis diatur oleh SOP masing-masing penyelenggara layanan. SOP mengatur masyarakat dari mulai mendaftar, mendapat nomor antrean, masuk dan dilayani, sampai selesai,” lebih dari 361 yang dilayani Mall Pelayanan Publik yang terdiri dari layanan perizinan dan non perizinan. dan 23 loket layanan yang tersedia, Layanan yang paling dominan adalah layanan kependudukan, SKCK dan SIM. Tentunya masyarakat sangat terbantu dengan adanya MPP ini. Keberadaan MPP tersebut menjadi alasan DPMPTSP

menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada 10 Desember 2019.

(11) Produk Inovasi: Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Inovasi: Mall Pelayanan Publik

Unit Pelaksana: Pemerintah Kabupaten Karawang - Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karawang merupakan salah satu yang memberikan pelayanan e-Dukcapil bagi masyarakat dan surat-surat penting lainnya. Sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien, sehingga masyarakat merasasangat terbantu atashadirnya Mall Pelayanan Publik dikutip Literasinews dari laman resmi Disdukcapil Kabupaten Karawang. e-Dukcapil, disediakan untuk memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan secara online di antaranya KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga Surat Pindah.

Dari uraian di atas pada masing-masing dari wilayah dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam bentuk pelayanan publik yang terdiri dari beberapa daerah yaitu: Peterpan, Layanan Adminduk Terintegrasi. e-KTP, KK, hingga KIA di Kab. Tubaba. Sekali Proses Dapat Komplit, Gunakan produk inovasi Bakso, Urus e-KTP, KK, Akta dan lainnya Di Lombok Timur Tak Harus Datang ke Disdukcapil, Inovasi SOBAT Layanan Online Urus e-KTP, KK, dan Lainnya di Kota Tangerang, Tak Perlu Ke Kantor Disdukcapil, Layanan SAGARURUNG KELI SALAI dan SEWUATI, Urus Adminduk e-KTP, KK, Akta dan Lainnya Jadi Mudah, e-KTP Hilang-Rusak, Cetak KK, Akta, Surat Pindah di Kota Bandung Urus Dari Rumah Gunakan Pemuda dan Salaman. Sementara inovasi Sarana Efektif Wadahi Urusan Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Inovatif (SEWUATI) milik

Disdukcapil Kabupaten Pringsewu. Demikian dikutip *Literasinews* dari laman resmi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada kualitas proses kerja baik eksternal maupun internal agar lebih sederhana dan efisien. Beberapa contoh produk inovasi seperti perubahan pelayanan penertiban paspor yang digagas oleh Direktorat Jendral Imigrasi melalui Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT)/Sistem *One Stop Service* (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jendral Imigrasi

Kementerian Hukum dan HAM berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang yang sebelumnya harus mengantre empat kali menjadi mengantre 1 (satu) kali dalam mendapatkan pelayanan paspor, contoh lainnya adalah produk inovasi pelayanan pertanahan jemput bola yang bertujuan lebih mendekatkan kepada masyarakat, pendekatan tersebut diharapkan menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, di mana sering kali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface loket kantor pertanahan karena formalitasnya.

Dalam menerapkan sebuah inovasi yang bersifat empiris, penekanan pada inovasi metode, strategi dan teknik menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan penerapan inovasi produk yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini perangkat infrastruktur berbasis teknologi diperlukan agar pelayanan yang dilakukan lebih efektif dan efisien serta mampu memecahkan masalah selain inovasi berbasis struktur organisasi yang bertujuan mengadopsi model organisasi yang fleksibel

dan mampu mengadaptasi perkembangan organisasi.

Kebijakan publik dalam penggunaan elektronik membuat masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi serta mengembangkan kreatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Produk Inovasi Kebijakan Publik Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat terdapat beberapa jenis produk inovasi kebijakan publik, yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem dan prosedur. Kemudian jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara dan teknik baru. Dan jenis inovasi produk yang terdiri dari fisik (barang) maupun nonfisik atau imaterial (jasa). Pada tataran empiris, manfaat inovasi dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan menjadi terpadu, perluasan pilihan publik (*public choice*) terhadap barang-barang publik (*public goods*), penguatan *public engagement* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, serta model-model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya

Produk Inovasi dan kebijakan publik ibarat dua sisi dari keping mata uang yang sama. Inovasi berkontribusi dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kebijakan publik sedangkan kebijakan publik memberikan suplemen teori, pedoman dan metodologi yang dapat memperkuat inovasi kebijakan publik. Upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang berdimensi kebaruan dan kebermanfaatannya sehingga diharapkan dapat

memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi diterapkan bukan hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik akan tetapi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Inovasi kebijakan publik muncul bukan karena faktor leadership atau karena faktor terjadinya krisis yang memaksa organisasi untuk ikut melakukan perubahan, inovasi harus muncul dari sebuah sistem dan efek *public manajemen knowledge* yang dikembangkan oleh organisasi.

Dasgupta dan Gupta, dalam Antonius Galih Prasetyo (2016: 6) mengatakan bahwa “Keberhasilan produk inovasi diukur dari sejauhmana kinerja kebijakan publik mampu menjadi *best solution* bagi masyarakat. Sinergitas antara tataran konseptual dan empiris merupakan garis kontinum dalam upaya merekonstruksi inovasi kebijakan publik yang berkelanjutan. *Framework* struktur, kultur, teknologi dan kepemimpinan”. dapat menjadi tawaran konsep yang menarik dan perlu dipertimbangkan dalam membangun komitmen dan kesadaran inovasi kebijakan publik di sisi lain proses, dinamika dan praktik inovasi harus bersifat adaptif dan replikatif, hal ini penting karena beragamnya permasalahan dan karakteristik organisasi dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Considine, Mark: Lewis Jenny M and Alexander, Damon, 2009, *Networks, Innovation and Public Policy*
- Direktori Administrasi Negara, 2014, *Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN-RI*
- Dwijanto, Agus et al., 2007, *Kinerja Tata Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM)- Kemitraan.
- Handbook Inovasi Administrasi Negara, 2014, *Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN-RI*
- Heruanto, Agus, 2006, *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*, <http://cpps.ugm.ac.id>
- Lydia Wijayanti, 2012, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Implementasi Kebijakan Pembangunan berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke pasar Klitikan Notoharjo*
- Mariana, Dede, 2010, *Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan Publik, Jurnal Governance Vol. 1 No.1*
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Noor, Irwan, 2016, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, Determinasi Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah: Paradoks di Era Desentralisasi*
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Ikapi Jakarta)*
- _____, 2014, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014, *Handbook Administrasi Negara (Lembaga Administrasi Negara Pusat Intan -Dian-LAN)*
- Prasetyo, Antonius, Galih, 2016 *Innovation Discussion Paper, Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI*
- Widodo Tri Wahyu, 2016, *Inovasi sebagai keniscayaan baru dalam Ilmu dan Praktik Administrasi Publik di Indonesia*, Laskar Inovasi Deputi Inovasi Administrasi Negara.
- Dasgupta dan Gupta, dalam Antonius Galih Prasetyo, 2016 *Innovation Discussion Paper, Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI hal 6*